

**TRANSFORMASI PENGELOLAAN SISTEM KEUANGAN DESA
(SISKEUDES) BERBASIS DIGITAL DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
PROVINSI RIAU**

Yunita Widya Caroline¹, Dr. Asep Hendra, SE.MM²
NPP. 31.0040

*Asdaf Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau
Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah*

Email: wiwid.iphone6@gmail.com

Email: asep_hendra@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *The existence of village financial management problems that continue to occur due to administrative errors and time delays in reporting village finances at the Community and Village Empowerment Service of Indragiri Hilir Regency has caused the Indragiri Hilir Regency government to issue a Decree from the Regent of Indragiri Hilir Number: Ktps.149/IHK-2022 year 2022 concerning Determination of the Action Plan for the Integrated Corruption Eradication Program for the Regional Government of Indragiri Hilir Regency. Following up on this, the transformation of digital-based village financial system management (siskeudes) began to be carried out by the Community and Village Empowerment Service of Indragiri Hilir Regency.*

Purpose: *The purpose of this research is to find out and understand the Digital-Based Village Financial System Management Transformation (Siskeudes), to know and understand the obstacles to the Digital-Based Village Financial System Management Transformation (Siskeudes), as well as to know and understand the efforts made by the government regarding resolving the Management Transformation obstacles. Digital-Based Village Financial System (Siskeudes) in Indragiri Hilir Regency, Riau Province.*

Method: *The research method used in this research is descriptive qualitative. The types of data used by the author are primary data and secondary data. The data collection techniques used were interviews, observation and documentation.*

Result: *shows that the digital-based transformation of village financial system management (siskeudes) has been going well but several obstacles are still found.*

Conclusion: *The conclusion is that the obstacles encountered in the transformation of digital-based management of village financial systems (siskeudes), namely, uneven networks, lack of supporting human resources, inadequate facilities and infrastructure. The efforts made are by*

providing an internet network in the form of WiFi, providing training in the form of technical guidance and making a letter of fulfillment of infrastructure.

Keywords: *Transformation, Village Financial Management, Village Financial System Application (Siskeudes)*

ABSTRAK (in bahasa)

Permasalahan (GAP): Adanya permasalahan pengelolaan keuangan desa yang terus terjadi karena kesalahan administratif dan keterlambatan waktu pada pelaporan keuangan desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indragiri Hilir menyebabkan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor: Ktps.149/I/HK-2022 tahun 2022 tentang Penetapan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Menindaklanjuti hal tersebut, transformasi pengelolaan sistem keuangan desa (siskeudes) berbasis digital mulai dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indragiri Hilir. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami Transformasi Pengelolaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Berbasis Digital, untuk mengetahui dan memahami kendala dari Transformasi Pengelolaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Berbasis Digital, serta mengetahui dan memahami upaya yang dilakukan pemerintah terkait penyelesaian kendala Transformasi Pengelolaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Berbasis Digital di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif deskriptif. Jenis data yang digunakan penulis yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, serta dokumentasi. **Hasil/Temuan:** menunjukkan bahwa transformasi pengelolaan sistem keuangan desa (siskeudes) berbasis digital sudah berjalan dengan baik namun masih ditemukan beberapa kendala. **Kesimpulan:** Kesimpulannya yaitu kendala yang ditemui dalam transformasi pengelolaan sistem keuangan desa (siskeudes) berbasis digital yaitu, jaringan yang tidak merata, kurangnya sumber daya manusia yang mendukung, sarana dan prasarana yang kurang memadai. Upaya yang dilakukan adalah dengan menyediakan jaringan internet berupa wifi, memberikan pelatihan dalam bentuk bimbingan teknis dan membuat surat pemenuhan sarana prasarana.

Kata kunci: *Transformasi, Pengelolaan Keuangan Desa, Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah Desa merupakan lembaga pemerintah yang mengayomi dan mengatur masyarakat dalam wilayah tertentu seperti terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, bahwa desa adalah desa adat atau yang disebut dengan

nama lain. Selanjutnya, disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah desa juga mempunyai tugas, hak dan kewajiban tersendiri dalam mengatur keuangan desa yaitu menyusun serta menyampaikan laporan. Laporan yang disampaikan yaitu berupa “Laporan Semesteran Realisasi Pelaksanaan APBDes, Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes, Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes yang terdiri dari Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan” (Soleh, Heru 2015:236).

Salah satu permasalahan yang terjadi ada terdapat di Kabupaten Indragiri Hilir yang bersumber dari media center riau pada tahun 2019-2020 bahwa masih terdapat desa yang belum menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa, belum memiliki prosedur yang dibutuhkan untuk menjamin tertib administrasi dan pengelolaan keuangan serta kekayaan milik desa, serta belum menyusun laporan sesuai ketentuan. Evaluasi APBDesa juga belum didukung kesiapan aparat kecamatan serta pengawasan belum didukung SDM memadai di tingkat APIP Kabupaten/Kota. Pada tahun 2020 Kabupaten Indragiri Hilir mendapatkan alokasi dana transfer ke daerah dan dana desa sebesar 1.560.680.082 dapat dilihat pada tabel 1.1 di bawah ini:

Tabel 1.1
Daftar Alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Kabupaten Indragiri Hilir

URAIAN	ALOKASI
1	2
TRANSFER KE DAERAH	1.392.122.202
1. DANA PERIMBANGAN	1.383.469.358
Dana Transfer Umum	1.055.596.167
1. Dana Bagi Hasil	169.738.081
2. Dana Alokasi Umum (DAU)	885.858.086
Dana Transfer Khusus	327.873.191
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	70.181.423
2. Dana Alokasi Khusus Nonfisik	257.691.768
2. DANA INSENTIF DAERAH	8.652.844
DANA DESA	168.557.880
JUMLAH	1.560.680.082

Sumber: *Kemenkeu.go.id*

Salah satu upaya pemerintah desa untuk mewujudkan konsep sistem administrasi pemerintahan yang baik dan terstruktur adalah dengan cara mencanangkan penyelenggaraan pemerintahan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini tertuang pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Untuk mewujudkan SPBE yang terpadu, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah perlu melakukan upaya transformasi yang mendasar dan berkelanjutan di dalam pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE. Keterpaduan SPBE ditujukan untuk memanfaatkan sumber daya SPBE secara optimal dan mencegah timbulnya duplikasi inisiatif dan anggaran dalam pelaksanaan SPBE.

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri berkolaborasi membuat aplikasi bernama Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Sistem keuangan desa (Siskeudes) merupakan aplikasi yang digunakan oleh desa untuk membuat, mengelola, dan melaporkan anggaran desa yang bersumber dari APBN. Sistem keuangan desa (Siskeudes) secara otomatis menghasilkan laporan-laporan yang diperlukan, sehingga menghemat waktu dan biaya, mengurangi kesalahan, serta membantu agregasi data.

Kabupaten Indragiri Hilir juga mulai menerapkan sistem keuangan desa (siskeudes) berbasis digital ini. Kebijakan tersebut diambil melalui Surat Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor : Kpts.149/I/HK-2022 tanggal 31 Desember 2022 tentang Penetapan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022. Dari surat keputusan itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Indragiri Hilir melalui Jafung Pengerak Swadaya Masyarakat dan Desa Sub Koordinator Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa berupaya melakukan Pengembangan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) *Of-line* menjadi Aplikasi Siskeudes On-Line dari latar belakang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Secara bertahap aparatur desa di Indragiri Hilir mengikuti pelatihan sistem pengelolaan keuangan desa (siskeudes) berbasis digital.

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir harus cermat memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dalam mengelola keuangan desa untuk meminimalisir kesalahan administratif dan keterlambatan laporan yang terjadi, apalagi saat ini untuk pencairan dana desa harus dilakukan melalui aplikasi Siskeudes. Sistem keuangan desa (Siskeudes) tentu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Dimana kelebihan dan kekurangan tersebut dijadikan acuan bagi penulis untuk meneliti pengelolaan keuangan desa dengan menggunakan sistem keuangan desa (Siskeudes) di Kabupaten Indragiri Hilir.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan transformasi sistem pengelolaan keuangan desa (siskeudes) yaitu pelaksanaan penyusunan laporan pelaksanaan dan laporan pertanggungjawaban dana desa terus terjadi kesalahan administratif dan

material dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga potensi kecurangan dapat dilakukan dengan memalsukan kuitansi dan nota serta membuat laporan yang tidak sesuai kenyataan. Oleh karena itu banyak terjadi kasus korupsi dana desa, contohnya penyalahgunaan anggaran. Menurut Data dari *Indonesian Corruption Watch (ICW)* tentang praktik korupsi pengelolaan keuangan desa dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 mencapai 252 kasus, korupsi dana desa pada tahun 2015 mencapai 22 kasus dan meningkat menjadi 48 kasus pada 2016. Jumlah kasus korupsi naik lagi menjadi 98 kasus pada 2017 dan 96 kasus pada 2018 dengan total kerugian negara mencapai Rp 107,7 miliar” yang disebabkan berbagai hal yaitu kurangnya pemahaman pemerintah terhadap isi pengelolaan dana desa dan prinsip-prinsip supremasi hukum, aturan dan kebijakan pengelolaan dana desa, kurangnya kualifikasi aparatur pemerintah desa serta kurangnya transparansi dan pengawasan. Salah satu permasalahan yang terjadi ada terdapat di Kabupaten Indragiri Hilir yang bersumber dari media center riau pada tahun 2019-2020 bahwa masih terdapat desa yang belum menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa, belum memiliki prosedur yang dibutuhkan untuk menjamin tertib administrasi dan pengelolaan keuangan serta kekayaan milik desa, serta belum menyusun laporan sesuai ketentuan. Evaluasi APBDesa juga belum didukung kesiapan aparat kecamatan serta pengawasan belum didukung SDM memadai di tingkat APIP Kabupaten/Kota.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks sistem pemerintahan berbasis elektronik maupun konteks transformasi pengelolaan sistem keuangan desa berbasis digital. Penelitian Muhammad Anur Ridwan (2019) berjudul Analisis Peran Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Bogorejo, Kecamatan Godong Tataan, Kabupaten Pasawaran), menemukan bahwa pengelolaan aplikasi Siskeudes di desa ini sudah terstruktur dengan baik dan sudah memenuhi standar penerapan pada proses pertanggungjawaban yang cukup relevan sehingga semua proses pengelolaan keuangannya sudah baik.

Penelitian Aziza Novirania (2018) berjudul Implementasi Aplikasi Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Bogorejo, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pasawaran menjelaskan bahwa suatu pemahaman pemerintah desa terhadap program Siskeudes sudah paham terkait keterbukaan laporan keuangan desa yang lebih baik. Penelitian Sri Wahyuni (2019) berjudul Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Kuta Bakti Kecamatan Babul Makmur Kabupaten Aceh Tenggara), menjelaskan bahwa dalam pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan desa ini sudah akuntabilitas dan transparansinya sudah cukup baik, tetapi masih memiliki kelemahan dan kelebihan.

Penelitian Debrina Nada, dkk berjudul Inovasi Digital dalam Pelaksanaan

Penggunaan Aplikasi SISKEUDES, menjelaskan bahwa Penerapan aplikasi SISKEUDES di Desa Karang Mukti masih seringkali terkendala baik secara teknis maupun karena jaringan Desa yang cukup sulit. Dengan demikian, penerapan aplikasi SISKEUDES masih belum bisa dikatakan sudah efektif. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan untuk evaluasi kembali para pembuat kebijakan dalam mengatasi pelaksanaan pengelolaan keuangan berbasis digital kepada setiap Desa.

Penelitian Irda Rosita, dkk berjudul Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Digital pada Kelompok Pengelola Wisata Kapalo Banda Taram, menjelaskan bahwa telah terjadi penambahan pengetahuan dan keterampilan mitra, dimana mitra telah mampu secara mandiri menyusun laporan keuangan sederhana menggunakan aplikasi “Akuntansi UKM”. Sehingga kelompok mitra dapat menyajikan laporan keuangan tersebut bukan hanya pada internal kelompok namun juga pada pihak eksternal yaitu pemerintahan nagari sebagai wujud transparansi pengelolaan wisata yang telah diamanatkan masyarakat setempat kepada mitra pengelola.

Penelitian Sri Roekminiati (2021) berjudul Sistem Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Tehnologi Informasi (Studi Kasus Desa Kureksari, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo), menjelaskan bahwa Pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Kureksari bersumber dari Dana Desa dan sudah sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Selain itu pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Dana Desa berbasis online yaitu dengan menggunakan aplikasi OM-SPAN dan Siskeudes. Peranan perangkat Desa ketika mendukung keberhasilan Pengelolaan Dana Desa melekat pada semua proses pengelolaan keuangan Desa. Draft pengembangan model sistem pengelolaan keuangan desa berbasis teknologi informasi menempatkan Server ada di Desa Kureksari, penambahan bandwidth menjadi minimal 1 Mbps. Semua proses berbasis data, satu aplikasi dalam sistem pengelolaan keuangan desa, jaringan kabel data antar komputer, E-laporan dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta online data antara Desa, Kecamatan dan Kabupaten, sehingga memudahkan penggabungan dan rekonsiliasi data.

Penelitian Novindia Ayu Lestari, dkk (2023) berjudul Inovasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Berbasis Online Dalam Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Agam, menjelaskan bahwa inovasi yang diterapkan Kabupaten Agam dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa melalui Aplikasi SISKEUDES offline menjadi SISKEUDES berbasis online memiliki fungsi yang lebih efektif dan efisien dalam penerapan dilapangan sehingga mendukung tata kelola pemerintah lebih baik dan maju.

Penelitian Sekar Dian (2023) berjudul Analisis Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Desa Untuk Mewujudkan Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Desa Karangawen Kabupaten Demak, menjelaskan bahwa langkah Akuntabilitas dan Transparansi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Karangawen Demak sudah sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014

dan Permendagri No.20 Tahun 2018. Dan praktik transparansi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Karangawen Kabupaten Demak menggunakan sistem terbuka yang memudahkan warga untuk mendapatkan informasi keuangan dengan mudah. Hal ini dimungkinkan karena semua informasi desa selalu diperbarui dan dipasang di papan informasi yang dipasang di depan Kantor Desa.

Penelitian Rita Marini, dkk. (2019) berjudul *Pengelolaan Keuangan Berbasis Aplikasi Sistem Keuangan Desa*, menjelaskan bahwa Penerapan aplikasi SISKEUDES dalam pengoperasiannya telah sesuai prosedur dari BPKP, namun belum optimal. Faktor utama yang menghambat penerapan SISKEUDES adalah lemahnya sumber daya manusia dan terbatasnya fasilitas yang memadai. Pelatihan berkelanjutan terhadap perangkat desa sangat diperlukan untuk meningkatkan kemampuan dan daya ingatnya terkait pengoperasian aplikasi SISKEUDES.

Penelitian Amelia Ningsih, dkk. (2022) berjudul *Implementasi sistem keuangan desa dalam transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bulak Kabupaten Indramayu*, menjelaskan bahwa perlu adanya pelatihan dalam hal penerapan Aplikasi SISKEUDES. Dan terakhir pada faktor komunikasi dapat dikatakan bahwa komunikasi yang terjalin cukup baik antara pemerintah desa, BPD dan masyarakat baik dalam menetapkan APBDes ataupun dalam hal pembangunan Desa. Akan tetapi, hal tersebut akan lebih baik lagi jika komunikasi antar aparat desa dalam hal penggunaan dan pengaplikasian SISKEUDES berjalan dengan baik, sehingga tidak ada lagi yang saling mengandalkan satu sama lain, dan semua aparat desa mampu mengoperasikan aplikasi tersebut.

Penelitian Fatmawati, dkk (2022) berjudul *Integrasi Dimensi Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis *Electronic Government*: Studi Pada Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)*, menjelaskan bahwa pemberlakuan aplikasi siskeudes telah memaksa aparat desa untuk menyesuaikan diri dengan sistem yang berlaku. Penerapan E-government merupakan upaya yang perlu dilakukan sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di tingkat desa. Dengan adanya siskeudes, desa mampu mengelola keuangan desa dengan baik sehingga dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat desa. Mulai dari proses penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban sampai dengan pelaporan keuangan desa. Penerapan Sistem Keuangan Desa dalam Pengelolaan Keuangan desa bisa berjalan dengan baik dengan diterapkannya aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni terkait transformasi pengelolaan sistem keuangan desa (siskeudes) berbasis digital dengan menggunakan teori transformasi TAM (*Technology Acceptance Model*) menurut Davis (Markotim 2019:608) yang terdiri dari 2 (dua) dimensi yaitu: Persepsi Kegunaan (*Perceived Usefulness*) dan Persepsi Kemudahan Penggunaan (*Perceived Ease Of Use*). Penelitian ini jelas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh

Fatmawati, Muhammad Anur Ridwan, Sri Wahyuni, Aziza Novirania, Sekar Dian, Amelia Ningsih dkk, Novindia Ayu Lestari, Debrina Nada, Sri Roekminiati.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami Transformasi Pengelolaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Berbasis Digital, untuk mengetahui dan memahami kendala dari Transformasi Pengelolaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Berbasis Digital, serta mengetahui dan memahami upaya yang dilakukan pemerintah terkait penyelesaian kendala Transformasi Pengelolaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Berbasis Digital di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif pendekatan induktif karena peneliti ingin mengetahui serta memperoleh secara jelas bagaimana transformasi pengelolaan sistem keuangan desa (siskeudes) berbasis digital di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Penelitian kualitatif menggunakan analisis data secara induktif dikarenakan wajib merujuk terhadap temuan yang didapati di lapangan, dengan demikian mau ataupun tidak mau peneliti kualitatif wajib memenuhi kelengkapan diri dengan peralatan rekam ataupun hal yang sejenis. (Simangunsong 2017:19). Penelitian kualitatif merupakan penelitian partisipatif yang desain penelitiannya memiliki sifat fleksibel atau dimungkinkan untuk diubah guna menyesuaikan dari rencana yang telah dibuat, dengan gejala yang ada pada tempat penelitian yang sebenarnya. Penulis mengumpulkan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Menurut Sugiyono (2009:221), penentuan sampel atau informan dalam penelitian kualitatif berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum, karena itu orang yang dijadikan sampel atau informan sebaiknya yang menguasai atau memahami permasalahan khususnya mengenai transformasi pengelolaan sistem keuangan desa (siskeudes) berbasis digital. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 9 orang informan yang terdiri dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Indragiri Hilir, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Indragiri Hilir, Kepala Subbagian Keuangan dan Perlengkapan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Indragiri Hilir, Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Indragiri Hilir, Operator Siskeudes Kabupaten Indragiri Hilir, Pendamping Desa dan masyarakat (dalam hal ini sebanyak 2 orang). Adapun analisisnya menggunakan teori Transformasi TAM (*Technology Acceptance Model*) menurut Davis (Markotim 2019:608) yang terdiri dari 2 (dua) dimensi yaitu: Persepsi Kegunaan (*Perceived Usefulness*) dan Persepsi Kemudahan Penggunaan (*Perceived Ease Of Use*).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis transformasi pengelolaan sistem keuangan desa (siskeudes) berbasis digital di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau menggunakan teori transformasi TAM menurut Davis (1989:608) yang terdiri dari 2 (dua) dimensi yaitu: persepsi kegunaan (*perceived usefulness*) dan persepsi kemudahan pengguna (*perceived ease of use*). Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut:

3.1. *Perceived Usefulness* (Persepsi Kegunaan)

Diluncurkannya aplikasi siskeudes pada awal tahun 2023 di Kabupaten Indragiri Hilir menjadi kewajiban bagi pemerintah desa untuk bisa mengelola keuangannya dengan menggunakan aplikasi Siskeudes. Hal itu menjadi sesuatu yang tidak mudah bagi sebagian pemerintah desa untuk menerimanya. Dalam teori Davis (Markotim 2019:608) dimensi transformasi ini terdapat 3 (tiga) indikator yang mengacu pada operasional konsep dalam pengelolaan sistem keuangan desa berbasis digital, dalam pelaksanaan tersebut terdiri:

a. Peningkatan Efektivitas Kinerja

Peningkatan efektifitas kinerja seharusnya ada pada setiap transformasi digital yang lahir. Hal ini dikarenakan dalam transformasi digital diketahui mampu membuat efektifitas kinerja mengacu pada kapasitas sistem untuk menyelesaikan tugas dengan cepat sehingga tujuan dapat segera dipenuhi. Peningkatan efektifitas kinerja dari transformasi pengelolaan sistem keuangan desa berbasis digital sudah efektif, dengan dibuktikannya aplikasi ini tidak membutuhkan waktu yang lama dalam pengerjaannya dan hasilnya bisa maksimal.

b. Peningkatan Kualitas Kinerja

Terkait dengan peningkatan kualitas kinerja maka suatu transformasi digital haruslah memiliki target kualitas kinerja yang lebih baik daripada sebelumnya. Peningkatan kualitas kinerja akan membuat transformasi siskeudes berbasis digital ini bertahan lama untuk mencapai tujuannya dengan lebih mudah. Indikator dari peningkatan kualitas kinerja dari transformasi ini dapat dilihat dengan jelas yaitu menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan pemerintah desa cara konkret untuk memperbaiki kualitas kinerja serta membantu transformasi pengelolaan sistem keuangan desa (siskeudes) berbasis digital di Kabupaten Indragiri Hilir dikelola dengan baik sehingga menaikkan indeks kepuasan dan kepercayaan masyarakat.

c. Menyederhanakan Proses Kinerja

Transformasi pengelolaan sistem keuangan desa (siskeudes) berbasis digital haruslah memiliki dampak signifikan dalam mempengaruhi kinerja agar lebih mudah. Indikator ini memberikan gambaran mengenai mengembangkan metode kerja yang lebih baik yang memaksimalkan output sekaligus meminimalkan pengeluaran dan biaya bagi Dinas PMD Kabupaten Indragiri Hilir dalam melakukan pengelolaan keuangan desa. Transformasi

pengelolaan sistem keuangan desa (siskeudes) berbasis digital dapat menyederhanakan penyelesaian tugas oleh aparat desa. Hasil ini sesuai dengan tujuan dari diterapkannya siskeudes berbasis digital yaitu membantu kinerja pemerintah desa dalam pelaporan secara online. Namun masih ditemukan kendala, yaitu server yang digunakan masih disewa dari Jakarta.

3.2. *Perceived Ease of Use* (Persepsi Kemudahan Penggunaan)

Persepsi kemudahan penggunaan sebagai tingkat keyakinan seseorang bahwa dalam menggunakan sistem tertentu tidak diperlukan usaha yang keras. Dalam hal ini transformasi pengelolaan sistem keuangan desa (siskeudes) berbasis digital harus mudah diaplikasikan oleh pengguna tanpa mengeluarkan usaha yang dianggap memberatkan. Adapun indikator dalam dimensi ini adalah sebagai berikut:

a. Mudah Dipelajari

Munculnya sebuah transformasi digital tentunya harus memberikan pengetahuan yang dapat dipelajari dalam mempermudah pekerjaan pemerintah desa. Indikator ini dapat menggambarkan secara garis besar dengan adanya transformasi pengelolaan siskeudes berbasis digital ini dirasa sesuai dengan kebutuhan pemerintah desa. Aplikasi siskeudes membantu pemerintah desa dalam mengelola keuangannya sesuai dengan regulasi yang berlaku. Sehingga dalam indikator mudah dipelajari aplikasi siskeudes tersebut memberikan kejelasan tujuan penggunaan sistem dan kemudahan penggunaan sistem untuk tujuan sesuai dengan keinginan pemakai. Oleh karena itu, penerimaan aplikasi ini khususnya di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indragiri Hilir dianggap sebagai sebuah sistem yang mudah dipelajari

b. Mudah Digunakan

Dalam transformasi pengelolaan sistem keuangan desa (siskeudes) berbasis digital ini, artinya pada saat penggunaan ulang para pengguna bisa menggunakan website sesuai yang diinginkan setelah melakukan penggunaan pertama. Penerapan aplikasi siskeudes memberi kemudahan dalam penggunaan aplikasi, namun pada dasarnya pengelolaan aplikasi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indragiri Hilir ini masih ditemukan kendala yaitu jaringan yang kurang merata yang menyebabkan terganggunya kemudahan penggunaan aplikasi siskeudes ini.

c. Mudah Dioperasikan

Sebagaimana dijelaskan oleh Davis (Markotim 2019:608) dalam bukunya menerangkan bahwa indikator mudah dioperasikan maksudnya jika menggunakan web retail suatu transaksi dapat dengan mudah dilakukan di tempat dan waktu yang tidak terbatas. Penerimaan aplikasi siskeudes di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indragiri Hilir dipertimbangkan sesuai dengan dimensi persepsi kemudahan pengguna (*perceived ease of use*) dari pemakai terhadap aplikasi tersebut. Oleh karena

itu, Teori TAM menjelaskan bagaimana sikap individu untuk menerima dan menggunakan teknologi. Jika di sesuaikan dengan tahapan pengelolaan keuangan desa menurut Pemandagri No. 20 Tahun 2018, aplikasi siskeudes ini sebagai pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Sebagaimana modul atau menu yang tersedia dalam melakukan tahapan pengelolaan keuangan desa melalui aplikasi Siskeudes yaitu dalam menu data entri terdapat empat modul yaitu, perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pembukuan. Sehingga Transformasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Berbasis Digital diharapkan akan lebih baik lagi kedepannya.

3.3. Kendala dalam Transformasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Berbasis Digital di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau

Pelaksanaan sebuah transformasi tidak akan pernah lepas dari berbagai kendala atau hambatan yang dialami. Kendala atau hambatan inilah yang nantinya akan menjadi pengganggu dalam mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Kendala dari Transformasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Berbasis Digital di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau terdapat pada indikator menyederhanakan proses kinerja dalam dimensi persepsi kegunaan (*perceived usefulness*) dan indikator mudah digunakan dan mudah dipelajari dalam dimensi persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*):

a. Jaringan Yang Tidak Merata

jaringan internet yang terkadang kurang memadai sehingga dapat menyebabkan *error system* ketika sedang melakukan input data yang akhirnya menghambat proses penyusunan anggaran menggunakan aplikasi siskeudes ini.

b. Kurangnya Sumber Daya Manusia Yang Mendukung

Proses pelaksanaan transformasi pengelolaan keuangan desa menggunakan aplikasi siskeudes tentunya tidak akan terlaksana dengan baik apabila para pelaksana yang ada di dalamnya belum cukup kompeten atau memiliki keterbatasan pengetahuan untuk menjalankan pengelolaan dana desa menggunakan aplikasi siskeudes ini. Para pelaksana atau pegawai yang menjalankan pengelolaan dana desa menggunakan aplikasi siskeudes ini memiliki keterbatasan pengetahuan sehingga dapat mengganggu jalannya proses pengelolaan dana desa menggunakan aplikasi siskeudes. Keterbatasan pengetahuan tentang aplikasi siskeudes ini juga disebabkan oleh sistem yang baru muncul sehingga masih proses adaptasi dalam pelaksanaannya.

c. Sarana dan Prasarana Yang Kurang Memadai

Server atau aplikasi yang baik akan membuat proses transformasi pengelolaan keuangan desa berjalan tidak lancar. Apabila server yang disediakan sulit untuk diakses maka akan menyebabkan proses pengelolaan keuangan desa ini menjadi terganggu. Server aplikasi siskeudes ini mesti dibeli sehingga server

yang digunakan mudah untuk diakses dimanapun dan kapanpun dan tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan tiap bulannya untuk aplikasi ini. Dengan server yang baik maka para pelaksana juga akan menjalankan tugas atau fungsi yang dimilikinya masing-masing dengan lancar.

3.4. Upaya pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir agar Transformasi Pengelolaan Siskeudes Berbasis Digital di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau berjalan dengan baik

Berkaitan dengan adanya permasalahan atau kendala dalam Transformasi Pengelolaan Siskeudes Berbasis Digital di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau maka tidak terlepas pula dari upaya dalam mengatasi kendala serta hambatan tersebut Adapun upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Menyediakan jaringan internet berupa wifi

upaya yang dilakukan oleh Kepala Dinas PMD Kabupaten Indragiri Hilir adalah dengan melakukan penyediaan jaringan tambahan berupa wifi kepada para pelaksana aplikasi siskeudes ini untuk mengoptimalkan kinerja dari aplikasi tersebut.

b. Memberikan Pelatihan Dalam Bentuk Bimbingan Teknis Secara Berkesinambung Kepada Pelaksana Aplikasi Siskeudes

Kurangnya pelatihan pada aplikasi siskeudes ini diawal kemunculannya membuat Pemerintah Daerah kesulitan dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa ini secara maksimal. Oleh karena itu dalam transformasi pengelolaan siskeudes berbasis digital ini diperlukan inisiatif masing-masing daerah untuk dapat melakukan sosialisasi dengan mengundang Kementerian Dalam Negeri sebagai narasumbernya. Untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan para pelaksana pengelolaan dana desa adalah dengan memberikan pelatihan secara berkala sehingga tidak tertinggal oleh perkembangan yang ada sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimiliki oleh masing-masing pelaksana pengelolaan dana desa menggunakan aplikasi siskeudes ini.

c. Membuat surat pemenuhan sarana dan prasarana dan Melaksanakan proses penginputan pengelolaan dana desa pada Aplikasi Siskeudes di malam hari

Dalam hal ini untuk meningkatkan ketersediaan server pada aplikasi siskeudes di Kabupaten Indragiri Hilir Dinas PMD berupaya membuat surat pemenuhan sarana dan prasarana kepada pemerintah pusat agar dapat diberikan sarana dan prasarana yang layak dan lebih baik. Upaya yang dilakukan oleh Dinas PMD Kabupaten Indragiri Hilir adalah dengan melakukan proses penginputan penyusunan anggaran di malam hari guna menghindari kesulitan ketika mengakses server karena diakses secara bersamaan yang dapat menimbulkan kesalahan.

3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Transformasi pengelolaan sistem keuangan desa (siskeudes) berbasis digital dibuat

untuk lebih mudah membuat laporan manajemen keuangan desa, yang berdasar pada keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor : Kpts.149/I/HK-2022 Tahun 2022 tentang Penetapan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir melakukan sebuah pengembangan Pengelolaan Sistem Keuangan Desa manual menjadi aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Berbasis Digital yang berlatar belakang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

4.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya (Opsional)

Penulis menemukan bahwa Transformasi pengelolaan sistem keuangan desa (siskeudes) berbasis digital ini akan menghasilkan output RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah), dan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Desa, APB (Anggaran Pendapatan dan Belanja) Desa, dokumen penatausahaan keuangan desa, laporan realisasi APB desa, laporan kekayaan milik desa, laporan realisasi per sumber dana dan laporan kompilasi di tingkat pemda.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Transformasi Pengelolaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Berbasis Digital di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau berdasar pada keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor : Kpts.149/I/HK-2022 Tahun 2022 tentang Penetapan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi sudah cukup baik namun masih ditemukan beberapa kendala.

Kendala Transformasi Pengelolaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Berbasis Digital di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau terdapat pada indikator menyederhanakan proses kinerja dalam dimensi persepsi kegunaan (*perceived usefulness*) dan indikator mudah digunakan dan mudah dipelajari dalam dimensi persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) yaitu jaringan yang tidak merata, kurangnya sumber daya manusia yang mendukung, sarana dan prasarana yang kurang memadai.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas PMD Kabupaten Indragiri Hilir dalam mengatasi kendala yang terjadi yaitu menyediakan jaringan internet berupa wifi, memberikan pelatihan dalam bentuk bimbingan teknis secara berkesinambungan kepada pelaksana aplikasi siskeudes, membuat surat pemenuhan sarana dan prasarana dan melaksanakan proses penginputan pengelolaan keuangan desa pada aplikasi siskeudes di malam hari.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Mengingat waktu penelitian yang dilakukan haanya selama dua minggu di lapangan.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan transformasi pengelolaan sistem keuangan desa (Siskeudes) berbasis digital di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Indragiri Hilir beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantudan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Amelia Ningsih, dkk. (2022). “Implementasi sistem keuangan desa dalam transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bulak Kabupaten Indramayu”. Vol. 3 No.1
- Aziza Novirania (2018). “Implementasi Aplikasi Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Bogorejo, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pasawaran”.
- Debrina Nadaa, dkk (2023). “Inovasi Digital dalam Pelaksanaan Penggunaan Aplikasi SISKEUDES”. Vol. 7 No. 1
- Fatmawati, dkk (2022). “Integrasi Dimensi Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis *Electronic Government*: Studi Pada Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)”. Vol. 2 No. 2
- Irda Rosita, dkk (2021). “Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Digital pada Kelompok Pengelola Wisata Kapalo Banda Taram”, Vol. 3 No. 2
- Markotim Wahyuni. (2019). *Perubahan dan Pengembangan Organisasi*. Bandung: Penerbit Yrama Widya
- Muhammad Anur Ridwan (2019). “Analisis Peran Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Bogorejo, Kecamatan Godong Tataan, Kabupaten Pasawaran)”
- Novindia Ayu Lestari, dkk (2023) berjudul Inovasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Berbasis Online Dalam Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Agam. Vol. 10 No. 5
- Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
- Rita Marini, dkk. (2019). “Pengelolaan Keuangan Berbasis Aplikasi Sistem Keuangan Desa”. Vol. 25 No. 2
- Sekar Dian (2023). “Analisis Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Desa Untuk Mewujudkan Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Desa Karangawen Kabupaten Demak”
- Simangunsong, F. 2017. *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alabeta.
- Soleh Chabib, Heru Rochansjah. (2015). *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: Fokusmedia
- Sri Roekminiati (2021). *Sistem Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Tehnologi Informasi (Studi Kasus Desa Kureksari, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo)*. Vo. 5 No. 1

Sri Wahyuni (2019). “Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Kuta Bakti Kecamatan Babul Makmur Kabupaten Aceh Tenggara)”.

Sugiyono. 2019. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

